



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS LMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA PENGEMBANGAN GERAKAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT
(PATBM) DI KABUPATEN BURU**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

OCLAILA SULAIMAN

NIM. 530039152

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2022

ABSTRACT

Implementation Analysis Women and Children Protection Policy In the Development of the Community-Based Integrated Child Protection Movement (PATBM) in Buru County

Oclaila Sulaiman

ellaoclaila@gmail.com

Open University Postgraduate Program

Violence that often occurs against women and children in Buru Regency is increasing every year. The Government of Buru Regency responded to this by issuing a policy in the form of Regional Regulation Number 13 of 2015. However, the issuance of this policy did not succeed in reducing the number of increases in violence. Therefore, the Government of Buru Regency began to issue a policy in the form of Regent's Instruction Number 266/79 concerning the Establishment of Community-Based Integrated Child Protection (PATBM). This study aims to analyze the Implementation of the Protection Policy for Women and Children in the Development of the PATBM Movement and the factors that influence it. The method used in this study is a qualitative method with descriptive research. The main focus that will be examined in this research are: (1) the implementation of women and children protection policies in PATBM (2) the factors that play a role in influencing the implementation of women and children protection policies in PATBM. The indicators used to measure policy implementation use Charles Jones theory while the indicators used to measure factors use Edwards III theory. This research uses triangulation analysis technique. The results obtained from this study are that the policy of protecting women and children in PATBM has not been implemented properly. It is said that, because of the 11 PATBMs formed, only 3 PATBMs carry out their functions properly. However, the 3 PATBMs were also not accompanied by a budget. The suggestions recommended in this study are that local government support is needed to provide confirmation for villages that do not form PATBM by providing sanctions and support from the village government to be able to build a stronger commitment in providing PATBM budgets. The implication of this research is that PATBM has an influence as the implementer of the protection policy. The implementation of protection policies by PATBM is carried out from the complaint registration process to integrated services using a reciprocal system.

Keywords: policy implementation, protection of women and children, PATBM

ABSTRAK
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA PENGEMBANGAN GERAKAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT
(PATBM) DI KABUPATEN BURU
DI KABUPATEN BURU

Oclaila Sulaiman
ellaoclaila@gmail.com
 Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buru meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Buru merespon hal ini dengan menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015. Namun, dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut tidak berhasil meredam jumlah peningkatan kekerasan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Buru mulai menerbitkan kebijakan berupa Instruksi Bupati Nomor 266/79 tentang Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak pada pengembangan gerakan PATBM serta faktor yang berperan dalam memberikan pengaruh terhadap implementasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan menggunakan teori Charles Jones sementara indikator yang digunakan untuk mengukur faktor menggunakan teori Edwards III. Analisis yang digunakan adalah analisis dengan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pengembangan Gerakan PATBM belum diimplementasikan dengan baik. Dikatakan demikian, karena dari 11 PATBM yang terbentuk, hanya 3 PATBM yang menjalankan fungsinya dengan baik. Namun, 3 PATBM tersebut juga tidak disertai dengan anggaran. Saran yang bisa diberikan pada penelitian ini adalah dibutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk memberikan penegasan bagi desa yang tidak membentuk PATBM dengan pemberian sanksi serta dukungan dari pemerintah desa untuk bisa membangun komitmen yang lebih kuat dalam penyediaan anggaran PATBM. Implikasi dari penelitian ini yakni PATBM mempunyai pengaruh sebagai implementer kebijakan perlindungan. Implementasi kebijakan perlindungan oleh PATBM dilakukan dari proses registrasi pengaduan sampai pada pelayanan secara terpadu menggunakan sistem resiprokal.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, perlindungan perempuan dan anak, PATBM